



EKOFEMINISME V

Pandemi Covid-19, Resiliensi, dan Regenerasi Kapitalisme

Pengantar : Arianti Ina Restiani Hunga

Editor : Dewi Candraningrum, Arianti Ina Restiani Hunga & Anita Dhewy

EKOFEMINISME V

Pandemi Covid-19, Resiliensi, dan Regenerasi
Kapitalisme

Pengantar:

Arianti Ina Restiani Hunga

Editor:

Dewi Candraningrum

Arianti Ina Restiani Hunga

Anita Dhewy

Parahita Press

EKOFEMINISME V

Pandemi Covid-19, Resiliensi, dan Regenerasi Kapitalisme

©2020, Pusat Penelitian dan Studi Gender Universitas
Kristen Satya Wacana

Lukisan Sampul : Dewi Candraningrum, 17 September 2020,
"Turquoise Hospital" acrylic on canvas
painted, 80 x 60 cm.

Terinspirasi oleh Delia Murwihartini

Tata Letak : Risa Dista Yudianingrum

Diterbitkan oleh

PARAHITA PRESS

Jl. Sumatera 144, RT 03 RW 07

Magersari, Salatiga 50733

Email: redaksi.parahitapress@gmail.com

Kontak: 0812-2504-6101

Bekerja sama dengan

Pusat Studi Gender dan Anak

Universitas Kristen Satya Wacana

ISBN: 978-623-92541-1-7

Daftar Isi

Pengantar

'Krisis' dalam Krisis: Pandemi Covid-19 & Ketimpangan Gender

vii

1. Arianti Ina Restiani Hunga

Perempuan Dalam Pandemi Covid-19 : Kerentanan, Resiliensi & Relevansi Kehadiran Negara (Studi Kasus Komunitas Perempuan Tenun dan Batik)

1

2. Ahmad Badawi

Dimensi Gender & Keadilan Ekologi Dalam Wabah Covid-19 di Indonesia

32

3. Anna Amalia Soetomo & Petsy Jessy Ismoyo

Kecerdikan Waria Sanggar Seroja di Kala Pandemi Covid-19

56

4. Defriyanti Puluhulawa

Kehidupan Perempuan Perkebunan Jagung Desa Tohupo Gorontalo di Tengah Pandemi Covid-19 : Kajian Ekofeminisme

79

5. Dewi Candraningrum

Krisis Gender & Regenerasi Kapitalisme dalam Pandemi Covid-19: Kartini Kendeng Menjaga Pangan dari Desa

96

6. Dhyah Ayu Retno Widyastuti

#dirumahaja: Kerentanan dan Adaptasi Perempuan pada Lingkungan

114

7. Elisabeth Dewi & A. A. S. Dyah Ayunda

Perempuan Menjalin Kembali Relasi Kehidupan: Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Tengah Pandemi Covid-19

137

8. Evangs Mailoa

Eksplorasi Percakapan di *Twitter Social Media*: Kajian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Selama Pandemi Covid-19

161

9. Irene Ludji

Peran Etika Solidaritas dalam Perlindungan Perempuan dan Anak di Masa Pandemi Covid-19

178

10. Junjanita Fridianova Sopamena & August Ernst Pattiselanno	
Perempuan di Maluku dalam Pandemi Covid-19: Studi Kasus di Pulau-Pulau Kecil	196
11. Kania Bening Rahmayna	
Pandemi Covid-19 dan Perubahan Sosial Baru: Mendorong Pengesahan RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual)	232
12. Lisa Elfena	
Kekerasan Seksual Berbasis Online dalam Kampus Selama Pandemi Covid-19: Studi Kasus Kolektif SALIRANG (SAMBUT, LINDUNGI, RANGKUL)	249
13. Mahram Mubarak M	
<i>War in Home dan Work from Home: Kekerasan dalam Rumah Tangga & Strategi Perempuan Menghadapi Pandemi Covid-19</i>	261
14. Miftahul Huda	
Kebijakan Pertambangan dan Kerentanan Perempuan di Masa Pandemi Covid-19	276
15. Paskanova Christi Gainau & Yuli Rawun	
Kemandirian Pelaku Usaha Perempuan di Kota Manado Selama Pandemi Covid-19	297
16. Peppy Angraini dan Elza Ramona	
Berladang di Tengah Hutan: Kajian Dampak Covid-19 Bagi Perempuan Petani Karet, Tebo, Jambi	334
17. Rizka Hidayatul Umami	
Perempuan di Simpang Pandemi dan Krisis Pangan: Sebuah Kajian Ekofeminisme	354
18. Sofa Marwah	
Mengharap Kehadiran Wakil Legislatif Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Awal	375
19. Sulistiawati	
Krisis Ekonomi, Ketahanan Perempuan & Ketimpangan Gender di tengah Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Sungai Pulai Kota Jambi	391

- 20. Yulianti Muthmainnah & Revoluna Zyde Khaidir**
Redefinisi Tafsir 'Nafkah' & Perjuangan Perempuan di
Akar Rumpun **413**
- 21. Yuni Feni Labobar&Alon Mandimpu Nainggolan**
Peran Pendidikan Kristiani bagi Penyandang Disabilitas di
Masa Pandemi Covid-19 **443**
- 22. Zaimatus Sa'diyah**
Konsep Ibu Bumi dan Ketahanan Pangan Kartini Kendeng
di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif
Ekofeminisme dan Ekoteologi Islam **463**

Mengharap Kehadiran Wakil Legislatif Perempuan pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Awal

Sofa Marwah

Universitas Jenderal Soedirman
sofamarwah@unsoed.ac.id

Abstract

This paper is an initial study, intended to see whether women's representatives in the legislature are present and contribute to women in society during the Covid-19 pandemic. Because at the time of the election, we have a strong desire to present the interests of women through women's representatives in the legislature. The hope is the same at the time of this pandemic. As a preliminary study, this paper uses a literature study to collect data and information needed. The results of the initial mapping regarding the presence of women representatives, it seems that information about them is so quiet. The presence of "women representatives" is even more displayed by those who focus on helping in the lower classes, through neighborhood communities, women's organizations, or local female leaders. As for the representatives of women in the legislature, if present, their existence is labeled with their written identity. Far from it all, what we need is their dedication and alignment to the fate of many women who suffered more during this pandemic, which is ongoing for some time.

Keywords: political representation, women, pandemic

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan identifikasi awal untuk melihat apakah wakil perempuan di legislatif hadir dan berkontribusi bagi perempuan di masyarakat selama masa pandemi Covid-19. Isu perempuan, dalam situasi apapun sering kali masih menjadi isu pinggiran. Tujuan ini secara jujur juga disadarkan oleh peringatan hari Kartini pada 21 April yang berlangsung di tengah pandemi. Seandainya pandemi tidak melewati hari Kartini, apakah kita juga berpikir isu perempuan penting dibahas pada masa pandemi ini. Ketika berpikir bahwa kaum perempuan secara spesifik juga berada

dalam situasi sulit, lalu selanjutnya adalah di manakah wakil kita kaum perempuan dalam pemerintahan. Pemikiran demikian muncul tatkala kita melihat kompleksitas gejala di masyarakat yang luar biasa, upaya-upaya untuk menangani dampak, dan hal apa yang terbaik kita bisa lakukan bagi mereka yang terdampak, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Dalam konteks demikian, penting melihat perempuan anggota legislatif yang dipilih dengan harapan membawa kepentingan perempuan, hadir untuk berkontribusi bagi kaum perempuan dan keluarganya yang terdampak pandemi dalam ragam aspeknya. Kehadiran politik perempuan di legislatif diadopsi dari pemikiran Anne Phillips (1995, h. 5), yang menjelaskan *the politics of presence* atau politik kehadiran. Liberalisme telah mensubordinasikan politik perempuan, oleh karena itu diperlukan keseimbangan politik setiap individu. Dalam hal ini, capaian keseimbangan setiap individu menjadi ukuran pencapaian demokrasi.

Dalam perkembangan Covid-19, penambahan jumlah pasien baik dalam kondisi ODP (Orang dalam Pemantauan), PDP (Pasien dalam Pengawasan), maupun positif Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terus bergerak tanpa arah kurva yang pasti. Demikian pula, tidak ada penjelasan secara detail, berapa laki-laki dan perempuan yang memiliki gejala terkait dengan covid-19. Informasi mengenai jumlah ODP, PDP, maupun positif Covid-19 masih bersifat netral gender. Berbagai kajian yang dibuat untuk menganalisis perkembangan Covid-19 membuahkan hasil yang beragam. Namun setiap wilayah pun memiliki karakter kondisi pandemi dan dampak kemasyarakatan yang berbeda.

Penulis mengambil contoh persoalan Covid-19 yang melanda wilayah Jawa Tengah. Menurut data dari Alvara Research Center, permasalahan utama di Jawa Tengah adalah masih cukup tingginya angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19, dengan jumlah pasien sembuh yang cukup rendah. Namun data tersebut tidak terpilah berdasarkan gender, sehingga jarang diketahui berapa pasien laki-laki dan perempuan. Data tersebut diambil hingga 25 April 2020. Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam tiga provinsi yang memiliki jumlah penduduk dengan kepadatan tinggi

dan sedang bergerak menuju puncak pandemi, dengan penambahan kasus harian yang tertinggi.

Ketika informasi masih bersifat netral gender, apa yang bisa dilakukan kaum perempuan dalam masa pandemi, dan di manakah wakil perempuan di legislatif yang dulu dipilih dengan kebijakan afirmasi kuota 30% untuk mengemban kepentingan kaum perempuan? Kajian awal ini akan mengupasnya lebih lanjut.

Metode Kajian

Kajian awal mengenai keterwakilan politik perempuan ini secara kategorial termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Danial 2009, h. 80). Berkaitan dengan jenis penelitian tersebut, pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan penelaahan terhadap data dan informasi yang bersumber dari literatur, makalah, buku-buku, jurnal, laporan dan sumber data lain yang terkait dengan topik kajian ini. Selanjutnya data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan koding terbuka, yaitu melakukan proses menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengonsepan, serta mengategorikan data (Strauss dan Corbin 2003). Data-data yang sudah dikategorikan kemudian dijabarkan dengan mendialogkan dengan berbagai teori yang relevan.

Keterwakilan Perempuan di Legislatif dalam Konsepsi Teoretis

Dalam kerangka konseptual, kajian awal tentang mengharap kehadiran wakil perempuan di legislatif untuk hadir dan berkontribusi bagi perempuan di tengah masyarakat, mengacu pada konseptualisasi Anne Phillips (1995) tentang *the politics of presence*. Argumentasinya, liberalisme telah mendorong pemisahan ruang publik dan privat yang semakin menyubordinasikan politik perempuan. Oleh karena itu persoalan gender dalam demokrasi menekankan pentingnya keseimbangan politik setiap individu dan menjadi ukuran pencapaian demokrasi. Dalam kerangka demokrasi langsung, kontrol menjadi fungsi dari *presence*. Standar formulasi kesetaraan politik adalah setiap orang seharusnya menghitung untuk satu, dan tidak satupun melebihi yang lain (Phillips 1995, h. 30).

Menurut penjelasan Hanna Pitkin (dikutip dalam Lovenduski 2008, h. 38), pengertian representasi (keterwakilan) yaitu aktivitas yang membuat perspektif, opini, dan suara warganegara "hadir" dalam proses pembuatan kebijakan publik. Terkait dengan keterwakilan politik perempuan, Pippa Norris (2003) menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan meningkatnya representasi perempuan dalam politik diperlukan sejumlah desain kebijakan tertentu yang disesuaikan dengan konteks negara masing-masing. Di Indonesia, hal tersebut diwujudkan dengan kebijakan afirmasi kuota minimal 30% wakil perempuan di legislatif. Adanya kebijakan afirmasi tersebut diyakini menjadikan keterwakilan perempuan dapat meningkat dan kemudian mendekati dan atau menjadi setara (Dahlerup 1998). Secara substantif, representasi politik bisa terjadi apabila aktor-aktor politik bicara, mengadvokasi, menandakan dan bertindak atas nama yang lain (*others*).

Namun, diskusi mengenai siapa yang menjadi wakil di legislatif sering kali justru mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih penting, yaitu apa yang sebenarnya diwakilkan. Hanna Pitkin (dikutip dalam Phillips 1995, h. 4) menegaskan representasi seharusnya bertindak dalam kepentingan yang diwakili secara responsif terhadap yang diwakili. Dengan demikian, berbicara mengenai keterwakilan sesungguhnya berarti berbicara apa yang direpresentasikan dan bagaimana hal itu dilakukan (Squires 1999, h. 202). Pada akhirnya ketika pandemi berlangsung, secara konseptualisasi kehadiran wakil perempuan di legislatif yang terpilih seiring dengan berjalannya kebijakan afirmasi, apakah mereka juga hadir untuk perempuan di tengah pergulatan menghadapi masa pandemi. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Squires, mereka yang sudah terpilih dapat dipotret seberapa jauh berbicara dan berlaku tentang semua hal mereka yang diwakili.

Inisiasi Lokal dan Kehadiran Kelompok Perempuan

Pandemi Covid-19 telah mendorong tumbuhnya aktivitas warga yang mencerminkan menguatnya jaringan sosial. Kalau dipetakan hal-hal yang dilakukan oleh warga masyarakat secara detail, tidak akan cukup tulisan ini menggambarkannya. Seperti pengalihan fungsi industri pakaian mulai dari penjahit rumahan

hingga perusahaan garmen untuk menjahit baju APD (alat pelindung diri), masker, penutup rambut, dan pelindung diri lainnya. Selain itu, muncul fenomena banyak orang berbagi masker, *handsanitizer*, sembako terutama untuk mereka yang terdampak Covid-19 secara ekonomi. Selanjutnya juga muncul berbagai edukasi untuk memberi pemahaman ke publik tentang pencegahan, penanganan jika ada yang mengalami gejala Covid-19, advokasi penderita, dan sebagainya. Di tengah kegusaran berlangsungnya pandemi, tampak gerakan kelompok masyarakat yang sangat membanggakan tersebut menunjukkan keperpihakkannya untuk melawan virus ini secara bersama-sama. Temuan Saiful Mujani Research Center (2020) menunjukkan bahwa anjuran dan kebijakan *social distancing* atau pembatasan sosial mendapat dukungan dari masyarakat secara nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, sesungguhnya data terpilah gender menjadi penting, agar kontribusi perempuan dapat terlihat dan diakui sama pentingnya dengan kontribusi laki-laki. Antara lain misalnya, kita tahu bahwa perawat paling banyak adalah perempuan yaitu 71% (Dingse Pandiangan 2020). Artinya mereka yang menjadi ujung tombak medis, paling banyak didominasi oleh kaum perempuan.

Banyak elemen masyarakat menyuarakan pola hidup sehat untuk mencegah Covid-19, dukungan psikologi, panduan jika terpaksa harus keluar rumah, pendampingan untuk anak-anak yang belajar dari rumah, panduan untuk perempuan hamil/melahirkan pada masa pandemi, dan sebagainya. Situasi demikian dilakukan oleh hampir seluruh elemen masyarakat, laki-laki maupun perempuan, mulai dari ormas seperti Muslimat NU dan Aisyiah Muhammadiyah, komunitas-komunitas, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan lainnya tanpa komando dari pemerintah. Dalam situasi normal pun, perempuan Muslimat NU dan Aisyiah sudah terbiasa berdonasi untuk menghidupi organisasi mereka dan berbagi untuk sesama. Selain itu, berkembang pula inisiatif-inisiatif oleh para ibu untuk mengembangkan tanaman untuk jamu seperti jahe, kunyit, temulawak, dan sebagainya. Tanaman-tanaman yang sudah terbiasa ditanam oleh ibu-ibu rumah tangga, pada masa pandemi ini mulai digalakkan kembali.

Selanjutnya perguruan tinggi juga mengambil inisiatif yang luar biasa untuk menopang keberhasilan perjuangan melawan Covid-19. Rasanya tidak bijak jika hanya menyebutkan beberapa kampus yang berkontribusi, karena hampir semua kampus di Indonesia berjuang bersama-sama untuk mendukung penanganan dampak Covid-19. Mereka bergerak sesuai dengan kapasitas keilmuan masing-masing, baik akademisi laki-laki maupun perempuan. Dari aspek kedokteran, misalnya riset tentang vaksin, pemeriksaan *test swab*, PCR, pengobatan, alat ventilator, *rapid test*, dan sebagainya. Dari aspek kesehatan, misalnya pemberian edukasi kesehatan mencegah Covid-19, pendampingan ODP/PDP, dan sebagainya. Untuk pengembangan teknologi misalnya penciptaan robot untuk pasien Covid-19, pengembangan ventilator, alat pelindung diri, dan sebagainya. Kontribusi juga diberikan untuk pengembangan herbal penguat ketahanan tubuh, riset pandemi Covid-19, penyediaan fasilitas kampus untuk isolasi mandiri, kajian tentang larangan mudik, studi tentang perilaku sosial masyarakat, dan sebagainya. Betapa membanggakan semua yang mereka lakukan untuk menopang situasi memprihatinkan ini. Salah satu kumpulan informasi tentang itu baca *Tempo* A43 Edisi 4 Mei 2020.

Dalam tataran pemerintah desa, mereka juga mengambil peran yang luar biasa. Dapat dikatakan desa sebagai benteng pertahanan terakhir sebagai unit yang paling bawah. Desa terbagi dalam pembentukan gugus Covid-19 pada tingkat RT. Beberapa contoh misalnya upaya Pemerintah Desa Panggungharjo Kabupaten Sleman dan Desa Demarji Kabupaten Banyumas. Sebelum pandemi, Desa Panggungharjo memiliki pasar desa yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya secara digital (*pasardesa.id*). Ketika pandemi tiba, Pemdes membentuk Pusat Pengendalian Panggung Tanggap Covid-19, dengan dukungan *hotline* untuk memonitor asistensi klinis. Pusat Pengendalian tersebut dikelola dalam satu *project management* yang terdiri dari tim data dan informasi, mitigasi sosial, mitigasi ekonomi, mitigasi klinis, relawan profesional, pengadaan produksi distribusi, dan *fund raising* (Pemerintah Desa Panggungharjo 2020).

Tentu saja, dalam penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya tersebut, kontribusi perempuan desa tidak bisa dipisahkan. Mereka mengambil bagian penting untuk memastikan setiap anggota keluarga dapat memperoleh akses dalam kebutuhan ekonomi. Pedagang pasar desa juga sebagian adalah kaum perempuan. Demikian pula kisah besar dari Pemerintah Desa Dermaji. Mereka membentuk sistem pengelolaan dengan jelas. Secara kelembagaan, mereka membentuk Satgas Desa, Satgas RW, Satgas RT, Tim Pengolah Data, Tim Medis, Relawan, dengan masing-masing unsur memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas. Selain itu, mereka memiliki mekanisme pelaporan secara daring melalui *website* desa (Pemerintah Desa Dermaji 2020).

Adapun kepemimpinan perempuan sebagai kepala desa dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dapat kita lihat pada kepemimpinan kepala desa perempuan di Desa Leceret Kabupaten Nganjuk. Keberadaannya dalam menangani dampak Covid-19 mengharuskan dirinya untuk terjun langsung ke masyarakat guna mengawal kegiatan penanganan dampak Covid-19, sehingga masyarakat lebih tergerak dan lebih diayomi (Januarista 2020). Upaya pencegahan dan penanganan dimulai dari pendataan warga di perantauan, pembagian masker, penyemprotan disinfektan, penertiban warga dengan berkeliling kampung, pemantauan pendatang, meminta masukan dari tokoh masyarakat dan agama, dan sebagainya. Semua hal tersebut didukung dengan pembentukan satgas, rumah singgah, dan sebagainya. Menurut Zulminari (2020) pengembangan kepemimpinan lokal perempuan merupakan proses pemberdayaan yang berkelanjutan. Artinya sering kali perempuan menghadapi tantangan dalam kepemimpinan terkait kapasitas dan kepercayaan diri, pranata sosial budaya, dan keterbukaan ruang partisipasi. Mereka yang terbiasa masuk organisasi atau LSM dalam situasi pandemi mampu menunjukkan inisiatif, spontanitas, daya juang, sehingga semangat warga tetap terjaga untuk saling mendukung dan melindungi. Dengan demikian, pandemi Covid-19 juga menjadi semacam ajang pembuktian mengenai kualitas kepemimpinan perempuan.

Seluruh deskripsi menggambarkan tumbuhnya inisiatif dan solidaritas sosial yang luar biasa. Berkembangnya solidaritas sosial

tersebut terjadi di tengah krisis penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Masyarakat mempelajari pengetahuan baru terkait pandemi Covid-19 mengenai cara pencegahannya, penularannya, ataupun cara penanganannya. Secara individu, mereka juga menjaga kebersihan, baik terhadap diri dan lingkungan, bahkan secara artikulatif juga mengingatkan satu sama lain untuk saling menjaga. Dari media massa kita mendapatkan informasi, pada saat bulan puasa dan menjelang Lebaran fenomena berbagi bahan makanan dari masyarakat semakin masif. Pada sisi ini, kaum perempuan juga mengambil peran yang sama penting dengan laki-laki. Kita bisa melihat pada kegiatan donasi sayur-mayur, lauk-pauk, nasi bungkus, untuk dibagikan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi. Pada aktivitas ini, kaum ibu-ibu memiliki inisiatif kerja dan komitmen yang luar biasa.

Solidaritas sosial itu mampu menjadi peredam kemungkinan terjadinya disrupsi sosial dan ekonomi yang lebih parah (Supriyati 2020). Sangat mungkin bahwa solidaritas sosial masyarakat terbentuk karena pada tataran akar rumput, masyarakat masih memiliki ikatan gotong royong yang kuat dengan semangat komunalitas. Dalam hal ini Sukesni (2020) mencatat bahwa organisasi lokal kelompok perempuan pada level RT (PKK pada level RT) merupakan ujung tombak dalam penanganan dampak Covid-19, baik di desa maupun di kota. Demikian pula peran dari koperasi wanita yang fokus pada pengadaan sembako maupun simpan pinjam. Dengan demikian, ketika perempuan banyak berkontribusi dalam sektor informal untuk menanggulangi krisis, mereka mampu meningkatkan kesadaran kolektif dan solidaritas sosial untuk bergotong royong. Secara tradisional, Sukesni menyebutkan bahwa wilayah pendidikan, kesehatan, pelayanan, perawatan dekat dengan nilai feminitas sehingga terdapat kesamaan antara kondisi alam semesta ini dengan nilai-nilai feminitas

Mengharap Hadirnya Perempuan Legislatif

Dari pengamatan penulis, diskusi tentang perempuan dalam pandemi Covid-19 mulai banyak dibahas dalam diskusi-diskusi (online) sejak menjelang peringatan hari Kartini 21 April.

Seandainya pandemi ini tidak melewati hari Kartini, akankah kita menyadari bahwa kaum perempuan secara spesifik ikut terdampak dan mereka adalah bagian penting dalam masyarakat yang ikut berkontribusi sama dengan laki-laki?

Bagaimanapun, pandemi telah berdampak pada ekonomi secara luas, berkurangnya pendapatan dari berdagang, pemutusan hubungan kerja, pekerja harian yang tidak bisa mendapat upah, dan sebagainya. Walaupun data tersebut terus bergerak, namun perempuan dan laki-laki sama-sama terdampak oleh kondisi demikian. Inisiatif-inisiatif untuk berbagi tersebut mencerminkan banyak hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, mulai dari solidaritas sosial untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka yang membutuhkan hingga mekanisme pemeriksaan warga yang keluar masuk RT hingga desa, seperti yang disebutkan di atas.

Studi Eddyono, Rahmawati, dan Ginting, (2020) menyebutkan bahwa dalam masa pandemi, marginalisasi telah menciptakan kerentanan ganda. Oleh karena itu, pandemi dapat menciptakan efek yang berbeda antarkelompok, yang dapat bersumber pada ketidakadilan gender. Meskipun laki-laki dan perempuan memiliki kontribusi yang sama-sama penting, tetapi dampak pandemi terhadap laki-laki dan perempuan dapat saja berbeda. Eksklusivitas telah menciptakan ketimpangan, sehingga masing-masing kelompok tidak mendapatkan layanan kesehatan dan layanan lainnya secara adil dan setara. Selain berbasis gender, kondisi demikian berlaku untuk kelompok yang mengalami marginalisasi seperti disabilitas, minoritas ras atau agama, masyarakat adat, dan sebagainya.

Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa pandemi dapat berdampak secara spesifik bagi perempuan dan laki-laki. Bagi perempuan, misalnya dialami oleh perempuan yang hamil/melahirkan, perempuan buruh, dan sebagainya. Bagi perempuan yang tetap di rumah dengan pendapatan ekonomi yang cukup, pandemi tetap memberikan dampak yang spesifik bagi kaum ibu. Dalam hal ini mereka menghadapi tambahan pekerjaan di rumah, mendampingi anak-anak belajar secara daring, ditambah melakukan pekerjaan produktif mereka sendiri yang mungkin saja terganggu karena beban ganda, dan sebagainya. Kondisi demikian

masih memperlihatkan situasi yang "baik" bagi mereka, yaitu bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang kondusif dan nyaman (Marwah 2020).

Namun demikian, ceritanya akan lain pada kehidupan rumah tangga yang rentan. Dalam masa pandemi Covid-19, tercatat kekerasan terhadap perempuan meningkat. Berdasarkan data dari Simponi PPPA 20 Februari 2020-17 Mei 2020, Puspayoga (2020) menjelaskan bahwa selama masa pandemi Covid-19, terdapat 319 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 321 korban. Adapun data dari Catahu Komnas Perempuan 2020 menyebutkan bahwa pada tahun 2019 sudah terjadi kekerasan sebanyak 14.719 yang terdiri dari ranah personal dan ranah komunitas. Jenis kekerasan dengan berbagai bentuk mulai dari fisik, psikis, seksual, ekonomi, hingga kekerasan yang terjadi pada buruh migran. Adapun tahun 2020, tercatat kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan sebanyak 199 pada bulan Februari, dan 207 pada bulan Maret, dengan kasus terbanyak berupa kekerasan berbasis gender secara daring/*online* (Qibtiyah 2020).

Selain situasi di atas, perempuan dan juga anak, dalam catatan Rahayu (2020) menunjukkan bahwa selama masa pandemi, perempuan dan anak adalah bagian kelompok yang rentan. Masalah yang dihadapi perempuan antara lain mencakup kecenderungan KDRT meningkat karena dipicu stres keluarga, kepulangan pekerja migran Indonesia menjadikan persoalan ekonomi bertambah, perempuan pekerja sektor informal banyak yang tidak bekerja lagi, perempuan sebagai kelompok dominan dalam tenaga medis rentan terpapar virus, peran ganda perempuan di rumah karena anak belajar dari rumah, akses perempuan lebih terbatas, dan sebagainya. Lebih lanjut, Rahayu menjelaskan bahwa Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menjalin kerja sama terkait perlindungan perempuan dan anak pada masa pandemi ini yaitu dengan memberi rekomendasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19, Kementerian Desa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan sebagainya.

Pertanyaan selanjutnya, di manakah perempuan anggota legislatif yang notabene kita pilih dengan harapan untuk mewakili

kepentingan perempuan? Pitkin (dikutip dalam Lovenduski 2008, h. 38) menjelaskan pengertian keterwakilan merupakan yang membuat perspektif, opini, dan suara warga negara "hadir" dalam proses pembuatan kebijakan publik. Tentu saja idealnya representasi seharusnya bertindak dalam kepentingan yang diwakili secara responsif terhadap yang diwakili. Pada masa kehidupan normal, kebijakan afirmasi telah menjadi pilihan utama untuk menyampaikan kepentingan kaum perempuan dalam sistem pemerintahan kita. Oleh karena itu, sejak dilaksanakannya pemilu tahun 2004, kebijakan afirmasi kuota 30% telah hadir menyertai penyelenggaraan pemilu untuk mendorong peningkatan wakil perempuan. Dalam pandangan Norris (2003) untuk meningkatkan keterwakilan politik perempuan memang diperlukan desain kebijakan tertentu. Dengan afirmasi, keterwakilan perempuan dapat meningkat dan kemudian mendekati dan atau menjadi setara (Dahlerup 1998). Dalam konteks demokrasi, kebijakan itu sah sebagai upaya perimbangan keterwakilan ketika *one man one vote* lebih menghasilkan "satu orang satu suara laki-laki" saja.

Namun demikian, kita patut mempertanyakan, di manakah perempuan wakil kita yang dulu kita pilih? Bukankah mereka dulu kita pilih dengan harapan membawa aspirasi perempuan? Dalam masa pandemi ini, ketika dampak Covid-19 dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan, apa yang mereka lakukan untuk kita? Dalam konteks ini, kita patut memikirkan kembali pernyataan Pitkin (dikutip dalam Phillips 1995, h. 4), yang menyatakan bahwa siapa yang menjadi wakil di lembaga legislatif mengalihkan perhatian dari pertanyaan yang lebih penting, yaitu apa yang sebenarnya diwakilkan oleh mereka.

Rasanya berbagai pemberitaan media massa terkait bagaimana perempuan anggota legislatif turun ke jalan memfasilitasi dan menopang ramai-ramai aktivitas warga untuk melawan Covid-19 kurang semarak. Ini adalah proses penyadaran bahwa kaum perempuan memiliki kebutuhan yang berbeda dengan laki-laki, demikian pula dalam masa pandemi. Oleh karena itu seharusnya kepentingan perempuan dapat terwakili oleh mereka yang dulu kita pilih untuk mewakili perempuan di legislatif. Dalam konteks demikian, Iris Marion Young (1993, h. 316) menyatakan

bahwa menghadirkan kebutuhan spesifik dan keterwakilan kelompok menunjukkan kesetaraan sosial dan menjadi bentuk pengakuan yang secara perlahan-lahan akan menghilangkan penguasaan budaya.

Dalam studi Shvedova (2005) ditunjukkan bahwa kiprah wakil perempuan di legislatif memiliki beberapa hambatan untuk berpartisipasi aktif. Namun, dalam pandemi ini kita memiliki harapan besar bahwa anggota legislatif perempuan membawa kepentingan perempuan di parlemen, melalui proses politik secara lebih sistematis dan terjaga keberlanjutannya. Penekanan ini dikarenakan tulisan ini belum menemukan kontribusi perempuan anggota legislatif yang masif memperjuangkan kaum perempuan di level bawah atau di sektor informal, selain berupa pembagian sembako, itupun dilabeli dengan foto dan nama mereka sebagai anggota legislatif dan partai tertentu. Keterwakilan perempuan memang bukan hanya di legislatif, tetapi juga di level jabatan lainnya. Selain legislatif, tentu ada eksekutif dan yudikatif, di pemerintahan hingga level terendah di desa, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu, maupun lembaga independen. Namun demikian, dalam situasi normal kita juga telah berjuang dan menempatkan keterwakilan legislatif menjadi fokus utama untuk menempatkan wakil perempuan di sana dengan harapan membawa kepentingan perempuan. Terlebih pada saat pandemi seperti ini, harapan tersebut semakin bertumpuk.

Mengacu pada studi Li-Ju Chen (2010) pengaruh kuota atau kebijakan afirmasi bagi perempuan anggota legislatif pada kenyataannya tidak bisa langsung serta-merta menjamin keterwakilan dan keputusan yang mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan. Dalam konteks demikian, Palulung (2020) menyebutkan bahwa untuk mendorong keterwakilan perempuan di legislatif tidak bisa dipisahkan dari proses seperti siklus yang saling berkaitan. Proses tersebut adalah dengan membangun pemilih yang cerdas agar menghasilkan lembaga pemilu yang berperspektif gender, sehingga mendorong keterpilihan dan keterwakilan perempuan. Selanjutnya perempuan yang terpilih dapat membangun kapasitas dan kompetensi. Mereka akan memahami tugas dan fungsinya, sehingga dapat merealisasikan

janjinya pada saat pemilu. Rasanya jika siklus tersebut dapat berjalan sebelum masa pandemi, maka ketika pandemi berlangsung, kepentingan perempuan akan dengan mudah terwakili di lembaga legislatif. Dalam hal ini menjadi relevan pandangan yang disampaikan oleh Judith Squires (1999, h. 202) bahwa ketika berbicara keterwakilan atau representasi, sangat penting menekankan pada berbicara apa yang direpresentasikan dan bagaimana hal itu dilakukan, sehingga lebih substantif. Terlebih pada saat pandemi ini, kita masih sulit menemukan keputusan, aktivitas, atau komitmen dari legislatif yang lebih bersifat ramah perempuan.

Penutup

Tulisan ini bisa saja salah, bahwa sebenarnya kepentingan perempuan melalui wakil perempuan di lembaga legislatif sudah berjalan, bahkan ketika masih berupa inisiasi-inisiasi. Namun yang jelas, apapun itu, proses tersebut rasanya jauh dari kata masif untuk memperlihatkan kebutuhan perempuan betul-betul sudah terwakili. Hasrat atas situasi yang masif sesungguhnya juga tidak berlebihan. Hal ini mengingatkan terakomodasinya kebijakan afirmasi dalam proses pemilu sejak Pemilu 2004 telah melalui jalan dan liku-liku yang luar biasa. Justru dalam konteks demikian, wajah-wajah perempuan banyak ditunjukkan oleh perempuan dalam komunitas lingkungan (RT/RW, dusun, desa) melalui PKK atau paguyuban. Demikian pula komitmen perempuan dalam ormas, akademisi, dan tentunya tenaga medis. Dalam hal ini, di tengah situasi pandemi yang penuh ketidakpastian, kita memerlukan dedikasi dan keperpihakan pada nasib banyak kaum perempuan yang lebih menderita saat pandemi, yang secara spesifik berbeda kebutuhannya dengan laki-laki. Mereka yang duduk di parlemen, sesungguhnya menjadi tumpuan besar akan harapan kita semua. Kelak sejalan dengan waktu, semoga itu semua dapat terwujud dan pandemi segera berakhir.

Daftar Pustaka

Alvara Research Center, 2020, *Up date covid-19 di Indonesia: analisa data,* dalam

<https://covid19.datapedia.id/images/research/analisa>
diakses 15 Mei.

- Chen, L.J. 2010, 'Do gender quotas influence women's representation and policies?', *The European journal of comparative economics* Vol. 7 No.1, 13-60.
- Danial, A.R, 2009, *Metode penulisan karya ilmiah*, Bandung, UPI.
- Dahlerup, D. 1998, 'Using quotas to increase women's political representation', dalam A Karam (ed.), *Women in parliament: beyond numbers*, Stocklom, IDEA.
- Eddyono, S, Rahmawati, A.D, Ginting, T.P, 2020, 'Pandemi dan yang tersingkir: menaksir urgensi inklusif penanganan kebijakan Covid-19', dalam MediaFISIPOLUGM (ed.), *Policy brief-penguatan solidaritas sosial di tengah pandemi covid-19*, Edisi ke-4, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 214-237.
- Januarista, W, 2020, 'Penanganan covid-19 di Desa Loceret Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) Kepemimpinan lokal perempuan dalam masa pandemi covid-19, Surabaya, 16 Mei.
- Kenny, M, 2004, *The politics of identity, liberal political theory and the dilemmas of difference*, Cambridge, Polity Press.
- Lovenduski, J. 2008, *Politik berparas perempuan*, Yogyakarta, Kanisius.
- Marwah, S, 2020, 'Perempuan dalam pandemi covid-19: seharusnya menjadi narasi yang penting', disampaikan dalam Webinar Himpunan Psikologi (Himpsi) Barlingmacakeb Peran perempuan menghadapi pandemi covid-19, Purwokerto, 21 April.
- Norris, P, 2003, 'Increasing women's representation in government: what options would work best for Afghanistan', Paper *The Afghanistan Reconstruction Project*, Center on International Cooperation, New York University.
- Pandiangan, D, 2020, 'Fokus menanam di rumah saja untuk menangani pandemi covid-19', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI)

- Fokus keluarga menanam untuk menangani pandemi covid-19, Surabaya, 28 April.
- Palulungan, L, 2020, 'Mendorong keterwakilan perempuan dan peran kepemimpinan perempuan', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) Kepemimpinan lokal perempuan dalam masa pandemi covid-19, Surabaya, 16 Mei.
- Pemerintah Desa Panggunharjo, 2020. 'Pusat pengendalian panggung tanggap covid-19', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia (APSIPOL), Purwokerto, 7 Mei.
- Pemerintah Desa Dermaji, 2020. 'Dermaji siaga covid-19', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Program Studi Ilmu Politik Indonesia, Purwokerto, 7 Mei.
- Young, I.M, 1993, 'From justice and the politics of difference', dalam P Green (ed.), *Key concepts in critical theory democracy*, New Jersey, Humanities Press.
- Phillips, A, 1995, *The politics of presence: the political representation of gender, ethnicity and race*, Oxford, Oxford University Press.
- Puspayoga, B, 2020. 'Keperpihakan pelayanan korban dan penegakan hukum pada kasus perempuan dan anak di era pandemi covid-19', disampaikan dalam Webinar Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, Jakarta, 21 Mei.
- Rahayu, E.T, 2020, 'Perempuan dalam masa pandemi covid-19, dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita Gender Indonesia (ASWGI) Dengan semangat hari kartini bersama kita tanggulasi Covid-19, Surabaya, 21 April.
- Qibtiyah, A, 2020, 'Semangat pandemi menghadapi pandemi covid-19', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) Dengan semangat hari kartini bersama kita tanggulasi covid-19, Surabaya, 21 April.
- Saiful Mujani Research Center, 2020, Wabah covid-19, 'Sikap atas kebijakan dan kondisi ekonomi warga: temuan survei

- nasional update 9-12 april 2020', dalam <https://saifulmujani.com/wabah-covid-19-sikap-atas-kebijakan-dan-kondisi-ekonomi-warga/> diakses 22 April.
- Squires, J, 1999, *Gender in political theory*, Cambridge, Polity.
- Strauss, A. dan Corbin, J, 2003, *Dasar-dasar penelitian kualitatif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Sukesi, K, 2020, 'Kepemimpinan lokal perempuan dalam masa pandemi covid-19', disampaikan dalam Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) Kepemimpinan lokal perempuan dalam masa pandemi covid-19, Surabaya, 16 Mei.
- Supriyati, 2020, 'Gerak relawan covid-19: tanggung jawab sosial individu dan masyarakat', dalam Media FISIPOLUGM (eds.), *Policy brief-penguatan solidaritas sosial di tengah pandemi covid-19*, Edisi ke-4, FISIPOL Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 194-213.
- Nadezhda, S, 2005, 'Obstacles to women's participation in parliament' dalam A. Karam, *Women in parliament: beyond numbers*, Stockholm, IDEA.
- Tempo A43, 'Kisruh bantuan sosial', Edisi 4 Mei 2020.
- Zulminarni, N, 2020, 'Kepemimpinan perempuan kepala keluarga di tengah masyarakat di tengah pandemi covid-19', Webinar Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender Indonesia (ASWGI) Kepemimpinan lokal perempuan dalam masa pandemi Covid-19, Surabaya, 16 Mei.

Dari pengalaman, narasi, dan refleksi ketiga perempuan memperlihatkan posisi perempuan sebagai agensi yang mengembalikan relasi kehidupan untuk ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal di tempat mereka masing-masing selama masa pandemi Covid-19. Peran gerakan perempuan sebagai agensi ini dilakukan dengan menerapkan inklusi sosial, yaitu melibatkan seluruh elemen, kemampuan, dan wawasan masyarakat lokal untuk meniscayakan kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal.

ELISABETH DEWI & A. A. S. DYAH AYUNDA

JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL & PROGRAM MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Jadi, melihat situasi yang serba tidak menentu yang mengakibatkan ekonomi keluarga hampir lumpuh total para ibu rumah tangga justru punya banyak langkah strategis untuk bisa tetap bertahan hidup dan memenuhi gizi keluarga. Hal ini menguatkan tesis Chodorow bahwa hal-hal yang selama ini dianggap sebagai peran dan tanggung jawab mutlak oleh laki-laki dan perempuan sesungguhnya bisa berubah dan direkayasa.

MAHRAM MUBARAK M

PROGRAM MAGISTER INTERDISCIPLINARY ISLAMIC STUDIES UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Di tengah paceklik akibat pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia sejak Maret 2020, mereka, para petani di Kendeng Utara menuai hasil panen. Mereka menyatakan bahwa lumbung pangan mereka aman, justru yang mereka khawatirkan adalah masyarakat di kota yang selama ini bergantung pada para petani untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka (beras). Maka menurut mereka, petani sudah selayaknya didukung.

ZAIMATUS SA'DIYAH

RADBOUD UNIVERSITY, NIJMEGEN BELANDA

Ingenuity yang dimiliki oleh waria di Sanggar Seroja menjadi kekuatan bertahan masing-masing waria. Kemampuan adaptasi yang dimiliki berasal dari diskriminasi yang selama ini kerap dialami. *Complex turns* dan negosiasi terlihat hanya dalam waktu tiga bulan komunitas Sanggar Seroja mampu mengombinasikan sektor pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya dengan peluang-peluang baru sebagai sebuah *shifting* (pergeseran) yang halus dan hati-hati menjadi keunikan dari waria.

ANNA AMALIA SOETOMO & PETSY JESSY ISMOYO

CRCs & ICRS UGM

Lockdown berkontribusi terhadap meningkatnya angka kekerasan dalam keluarga, konflik anak dan orang tua, dan munculnya perubahan kebiasaan baru di segala aspek kehidupan, termasuk munculnya problem mendasar di bidang pendidikan yang harus berjalan secara daring. Berpijak pada hal tersebut maka perlu didorong pengesahan RUU PKS sebagai bagian dari merespons perubahan sosial baru yang drastis dan dramatis karena pandemi ini.

KANIA BENING RAHMAYNA

JURUSAN SOSIOLOGI, FISKOM, UKSW SALATIGA

Parahita Press



Pusat Studi Gender dan Anak UKSW

ISBN 978-623-92541-1-7

